

PENYUSUNAN PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SECARA TERPADU

IR. DARMAWAN, MA

Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor

PENDAHULUAN

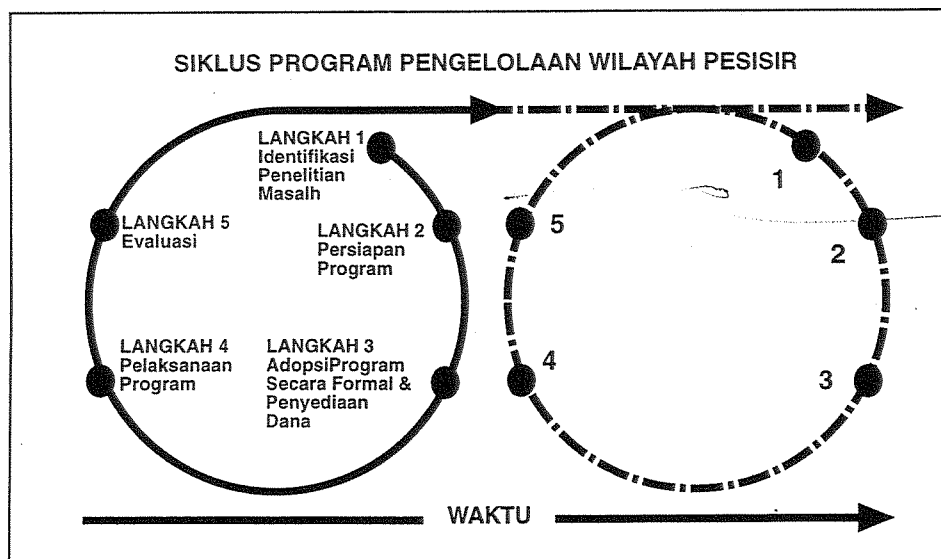
Seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat luas (termasuk politisi) terhadap pentingnya peranan pesisir dan lautan dalam pembangunan di Indonesia, maka dewasa ini istilah "Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (PWPT)" bukanlah satu hal yang asing lagi. Namun apa dan bagaimana sebenarnya PWPT tersebut mungkin justru belum banyak dipahami secara mendalam.

Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (PWPT) sebenarnya merupakan satu upaya yang menyatukan antara pemerintahan dengan komunitas, ilmu pengetahuan dengan manajemen, dan antara kepentingan sektoral dengan kepentingan masyarakat dalam mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan terpadu bagi perlindungan dan pengembangan ekosistem pesisir dan sumberdayanya. Tujuan akhir dari PWPT adalah meningkatkan kualitas hidup dari komunitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya yang terkandung di wilayah pesisir dan pada saat yang bersamaan juga menjaga

keanekaragaman hayati dan produktifitas dari ekosistem pesisir tersebut. Sehingga untuk mencapainya diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif dan realistis. Proses perencanaan suatu program pengelolaan serta kemudian implementasi dari apa yang direncanakan tersebut merupakan satu siklus yang berkesinambungan (gambar 1).

SIKLUS PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

Proses berkembangnya satu program dapat digambarkan sebagai satu lingkaran yang diawali dengan identifikasi dan analisis terhadap isu-isu lokal wilayah pesisir tersebut (Langkah Pertama). Langkah tersebut kemudian diikuti oleh menetapkan tujuan dan mempersiapkan rencana kebijakan dan program-program aksi. Setelah itu langkah ketiga menitikberatkan pada formalisasi perencanaan melalui jalur hukum, peraturan, kerjasama antar institusi dan mengalokasikan dana untuk pelaksanaannya. Berikutnya adalah tahap implementasi dari perencanaan tersebut. Adapun



Gambar 1. Langkah-Langkah dalam Siklus Kebijakan (GESAMP, 1996)

langkah terakhir yang sering terlewatkan adalah melakukan evaluasi. Siklus seperti ini menempatkan banyak kegiatan dari suatu program dalam satu sekuen yang logis dan membantu untuk menguraikan keterkaitan yang rumit dari unsur-unsur yang terdapat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam konteks tersebut "siklus program" ini dapat dianggap sebagai peta atau alat bantu navigasi dalam menelusuri proses yang kompleks, dinamis dan bersifat adaptif. Pengalaman dari beberapa negara maju maupun berkembang menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal harus dilaksanakan pada saat yang tepat agar program pengelolaan wilayah pesisir dapat dengan sukses bergerak terus menuju tujuan jangka panjangnya.

Di Indonesia sendiri, walaupun sudah cukup banyak proyek/program yang terkait dengan permasalahan di lingkungan pesisir, tapi hanya sebagian kecil saja yang benar-benar dirancang untuk menjalankan pengelolaan secara terpadu. Proyek pengelolaan wilayah pesisir di Segara Anakan, Cilacap pada tahun 1986-1992 boleh dikatakan merupakan yang pertama kali berupaya untuk mencari cara mengelola satu wilayah pesisir secara terpadu. Setelah itu menyusul berbagai inisiatif yang dilakukan baik oleh berbagai donor asing maupun oleh pemerintah sendiri dan pihak-pihak non pemerintahan lainnya. Namun sayangnya pendekatan yang dilakukan ataupun pemahaman konsep yang diambil seringkali kurang sesuai. Terkadang diatas kertas pendekatan dan konsep sudah tepat, tetapi pemahaman pelaksana proyek yang tidak sesuai. Sehingga yang sering terjadi adalah tidak jelasnya tujuan akhir dari proyek-proyek tersebut dan bagaimana tolok ukur keberhasilannya. Akibat yang berikutan adalah tidak terjadinya "pembelajaran" (*lesson learned*) antar proyek, alih pengetahuan maupun replikasi dari pelaksanaan/inisiatif yang berhasil karena setiap proyek cenderung untuk selalu mengulang "kembali dari awal" pelaksanaan proyek-proyek baru (*reinventing the wheel*).

Siklus penyusunan program sebenarnya merupakan panduan yang cukup baik bagi pelaksana proyek untuk melangkah ke kakinya dalam menjabarkan konsep pengelolaan wilayah pesisir di lapangan. Hanya sayangnya banyak hal dalam siklus tersebut yang sengaja maupun tidak sengaja ditinggalkan karena dianggap remeh. Anggapan

remeh ini muncul karena siklus tersebut sangatlah logis (sangat masuk akal) sehingga pelaksana cenderung punya sikap "sudah tahu" dan "bukan masalah". Hal yang terbukti salah pada akhirnya.

Langkah pertama

Pada langkah awal identifikasi dan pengkajian isu, setiap pelaksana mengetahui bahwa ini merupakan tahap dimana program/proyek pengelolaan pesisir didefinisikan dan dikaji. Semua memahami bahwa terdapat beberapa tindakan utama yang perlu dilakukan, seperti (1) mengidentifikasi *stakeholder* utama dan kepentingan serta minatnya; (2) mengkaji prinsip dan isu lingkungan, isu-isu sosial dan kelembagaan serta implikasinya; dan (3) mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang menghubungkan antara kegiatan manusia, proses alamiah dan kemunduran kualitas kondisi sumberdaya pesisir. Sering terjadi langkah pertama ini dianggap selesai setelah ketiga hal tersebut di atas dapat terdokumentasikan. Disinilah sebenarnya terjadi "kesalahan pertama".

Langkah pertama seharusnya hanya dapat dianggap selesai bila telah secara jelas menyusun rekomendasi mengenai isu-isu penting mana yang diprioritaskan untuk digarap terlebih dahulu dalam jangka waktu pelaksanaan proyek nantinya secara realistis. Permasalahan di wilayah pesisir selalu kompleks sehingga tidak realistis apabila satu (dan hanya satu proyek) untuk jangka waktu pendek (1-5 tahun) berusaha untuk menyelesaikannya sekaligus. Langkah pertama ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai 1,5 tahun.

Langkah kedua

Di langkah kedua, yakni persiapan dan perencanaan, memerlukan proses konsultasi yang lebih intensif dan proses perencanaan yang lebih mendalam terhadap berbagai macam alternatif tindakan yang direkomendasikan oleh langkah pertama. Hal ini karena tujuan utama dari langkah ini adalah menyusun satu rencana pengelolaan yang secara realistis dan terukur, sehingga dapat mengekspresikan kualitas lingkungan yang ingin dicapai dan dipertahankan, cara-cara bagaimana sumberdaya dapat dialokasikan, dan berbagai perubahan yang diperlukan dalam pola hubungan antara pengeksploitasian sumberdaya alam dengan tingkah laku masyarakat disekitarnya. Dalam

langkah inilah tujuan spesifik dari program/proyek harus didefinisikan secara jelas (satu hal yang sering sekali ditinggalkan!).

Tidak dapat dipungkiri bahwa langkah kedua merupakan langkah yang paling kompleks dan berlangsung selama beberapa tahun. Seringkali proyek-proyek bantuan dari donor diberikan dalam masa 3-5 tahun, dimana waktu tersebut hanya akan dapat dialokasikan untuk menyusun dokumen perencanaan pengelolaan, bukan pelaksanaannya. Terkadang pelaksana, baik LSM maupun pemerintah melupakan hal ini sehingga setelah selesai pekerjaan perencanaan, tidak ada lagi upaya untuk benar-benar merealisasikannya karena "proyek" sudah selesai. Oleh sebab itu pendekatan yang paling baik adalah dengan menyusun dan mencoba berbagai strategi serta tujuan untuk melakukan pemilahan terhadap berbagai pilihan yang ada. Dalam proses perencanaan ini termasuk juga pelaksanaan pengelolaan skala kecil (demo/pilot) untuk menguji fisibilitas dari rencana yang disusun untuk lingkup dan wilayah yang lebih luas.

Kegiatan utama dalam langkah kedua ini adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan penelitian ilmiah terhadap berbagai isu yang dipilih pada langkah pertama.
- Mendokumentasikan kondisi awal (*baseline*) wilayah pesisir yang akan dikelola.
- Menyusun rencana pengelolaan dan kerangka kerja kelembagaan yang akan melaksanakan program.
- Mempersiapkan sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan (implementasi) program.
- Merancang (mendesain) struktur kelembagaan dan proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program.
- Menguji strategi pelaksanaan program dalam skala kecil (*pilot/demo*)
- Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat (umum) dan *stakeholder*.

Apabila hasil dari langkah pertama sudah "salah" maka pada tahap ini kesalahan tersebut akan makin terakumulasi. Perencanaan yang disusun akan berupaya "menjawab" seluruh permasalahan yang diberikan dari hasil identifikasi. Akibatnya seluruh rencana hanya tinggal rencana karena sumberdaya yang ada (institusional, manusia dan biaya) tidak

mampu memikul tugas yang dilimpahkan dalam perencanaan tersebut. Kesalahan kedua ini biasanya bersifat "fatal". Artinya sebagian besar proyek pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia (yang jumlahnya juga tidak banyak) tidak pernah bisa beranjak ke langkah berikutnya

Langkah Ketiga

Apabila proyek "selamat" dan dapat berlanjut ke tahap berikutnya maka adopsi secara formal merupakan pengakuan terhadap rencana yang disusun, oleh pengambil keputusan dan kebijakan di tingkat tinggi, seperti menteri, gubernur ataupun presiden. Seringkali pengakuan ataupun persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan maupun peraturan perundangan lainnya. Adopsi dalam konteks ini meliputi persetujuan pendanaan dan pengalokasian sumberdaya manusia untuk melaksanakan tiap langkah yang direncanakan.

Tentunya sebelum sampai kesana dokumen yang disusun pada langkah kedua akan diteliti dan mendapat banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan seringkali membutuhkan revisi sebelum dapat disetujui. Sebagai konsekuensinya, dokumen perencanaan dapat mengalami perubahan mendasar terutama dari berbagai pertimbangan aspek teknis menjadi aspek politis, yang merupakan minat dan prioritas dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang mungkin akan terpengaruh oleh proyek tersebut. Dalam proses ini akan muncul berbagai argumentasi yang sebelumnya tidak terpikirkan atau tidak dianggap penting (satu kesalahan lagi!) oleh penyusun dokumen. Bahkan bila perencanaan pada akhirnya disetujui tidak berarti selalu selalu otomatis diikuti oleh persetujuan pengalokasi dana untuk melaksanakannya. Demikian pula persetujuan terhadap isi dokumen tidak selalu diikuti oleh persetujuan pengalokasi dana untuk melaksanakannya. Memang langkah ketiga ini merupakan satu tahap dimana terdapat proses tawar menawar dan pemberian akomodasi diantara berbagai pihak yang terkait ekonomis maupun politis. Bahayanya adalah apabila hasil kompromi tersebut pada akhirnya malah mengaburkan tujuan utama dari pelaksanaan proyek itu sendiri, dan ini memang sering sekali terjadi (kesalahan ketiga!). Tantangan yang harus dihadapi untuk dapat melalui langkah ini untuk sampai ke tahap pelaksanaan merupakan tantangan yang bahkan dapat lebih berat dibandingkan dengan langkah-langkah sebelumnya.

Langkah Keempat

Pada tahap ini rencana pengelolaan menjadi operasional dan titik berat proses beralih pada pengenalan bentuk-bentuk baru dari pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam, pengaturan institusional yang berganti, pelaksanaan pemantauan dan aplikasi dari kontrol serta peraturan yang baru. Pelaksanaan yang berhasil sangat tergantung pada kemampuan pelaksanaan proyek/program untuk menghadapi berbagai tantangan yang sebelumnya tidak terpikirkan dan dapat mengadaptasikannya ke dalam inti program yang sedang berjalan. Aktifitas utama yang biasanya terdapat dalam langkah ini meliputi: penyelesaian konflik, pengaturan koordinasi antar institusi, pembangunan infrastruktur, pendidikan masyarakat, pelatihan bagi pelaksana dan penegak hukum, perencanaan dan penelitian terhadap masalah yang baru timbul. Aktifitas-aktifitas tersebut termasuk dalam: (1) pelaksanaan mekanisme koordinasi antar lembaga dan prosedur-prosedur resolusi konflik; (2) pelaksanaan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan; (3) penguatan kapasitas pengelolaan program; (4) peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang dibutuhkan; (5) membangkitkan, mendorong atau meningkatkan partisipasi kelompok *stakeholder* utama; (6) menjaga agar prioritas program tersebut tetap berada dalam agenda publik; (7) memantau kinerja program dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan sosial; (8) mengadaptasikan program terhadap pengalaman yang mereka miliki, serta terhadap perubahan kondisi lingkungan, politik dan kondisi sosial.

Pada umumnya pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu hal yang rumit dan daftar dari permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan sangatlah panjang. Sabatier dan Mazmanian (1981), mengidentifikasi 6 (enam) prakondisi utama agar langkah ini dapat berjalan dengan baik, yaitu: (a) tujuan dan kebijakan yang jelas dan konsisten; (b) cukup baiknya ilmu pengetahuan yang menunjang kebijakan yang diambil; (c) kewenangan dan otoritas yang cukup; (d) struktur organisasi pelaksanaan yang baik; (e) kompetensi dan komitmen dari pelaksana; (f) mempertahankan tujuan dan prioritas program dalam agenda politik

Langkah Kelima

Pada tahap ini seharusnya dapat diperoleh suatu pembelajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat (*lesson learned*). Namun langkah ini sering disepelekan ataupun diabaikan dalam banyak proyek-proyek pengelolaan wilayah pesisir. Namun bila kita menginginkan adanya keberlanjutan dari satu generasi siklus ke generasi berikutnya, maka tahap ini harus dilakukan secara benar. Tindakan utama dalam langkah ini adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian program sesuai kebutuhan dan hasil evaluasi itu sendiri. Secara umum langkah evaluasi harus dapat menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu: (1) apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh program yang dilaksanakan terdahulu? dan bagaimana pengalaman tersebut dapat mempengaruhi penyusunan desain dan fokus dari program generasi berikutnya?; (2) apakah ada perubahan yang terjadi pada isu-isu dan lingkungan hidup semenjak program tersebut dijalankan?

Seringkali proyek-proyek dilaksanakan tanpa dilengkapi oleh perangkat evaluasi ataupun panduan untuk melakukannya sejak awal. Akibatnya apabila pada akhirnya ada evaluasi, maka itu hanya "memotret" kejadian yang sudah berlalu, tidak bisa merupakan umpan balik yang langsung berguna untuk memperbaiki kinerja proyek.

Evaluasi didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangkaian proses pengelolaan yang dilakukan secara selektif untuk memberikan informasi kepada para pengelola mengenai berbagai isu penting sebelum mereka mengambil keputusan-keputusan yang dapat berdampak besar. Tergantung pada lingkup dari keputusan yang akan dibuat, maka kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, baik pada kegiatan proyek tertentu ataupun pada kegiatan program yang lebih luas (Owen, 1993; Olsen, *et al*, 1998; Kay and Alder, 1999). Pada tingkat proyek, kegiatan evaluasi dapat memberikan informasi terhadap jalannya proyek tersebut. Berdasarkan informasi tersebut maka manager akan dapat menentukan berbagai perubahan maupun aksi yang diperlukan agar proyek tersebut dapat lebih meningkatkan kinerjanya ataupun untuk memperbaiki kinerja yang kurang. Sedangkan pada tingkatan program, maka hasil evaluasi dari berbagai proyek akan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mengkaji ketepatan perencanaan dan strategi program tersebut.

Setiap kali seseorang ingin melakukan evaluasi, maka kumpulan pertanyaan utama yang dirangkum oleh Owens (1993) di bawah ini dapat menjadi petunjuk sebelum melangkah lebih lanjut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: (a) apa yang menjadi alasan utama dilaksanakannya evaluasi tersebut?; (b) program/proyek yang akan dievaluasi tersebut telah mencapai tahapan apa dan bagaimana?; (c) aspek apa dari proyek/program tersebut yang akan dievaluasi; (d) bagaimana perkiraan ketepatan waktu pelaksanaan evaluasi dengan waktu pelaksanaan proyek/program secara keseluruhan?; (e) pendekatan evaluasi bagaimana yang akan dipergunakan dan apa metodologi pengumpulan dan analisis data dan informasi yang sesuai dengan pendekatan tersebut?

Selanjutnya Owens (1993) mengklasifikasikan pelaksanaan evaluasi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu: (1) evaluasi dampak, (2) evaluasi dalam pengelolaan program, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi desain, (5) evaluasi untuk pengembangan. Pendapat lain mengenai jenis evaluasi ini dikemukakan oleh Olsen, Lowry dan Tobey (1998). Mereka menyatakan bahwa evaluasi terhadap proyek ataupun kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama, yaitu: (1) Evaluasi Kinerja (*Performance Evaluation*), (2) Evaluasi Hasil (*Outcome Evaluation*), (3) Evaluasi Kapasitas Pengelolaan (*Management Capacity Assessment*).

Mengapa kita memerlukan cara untuk dapat melakukan evaluasi secara sistematis terhadap pelaksanaan “Pengelolaan Wilayah Pesisir (proyek/program)”?

Alasan utama mengapa kita membutuhkan perangkat evaluasi yang sistematis karena pelaksanaan proyek pengelolaan pesisir yang sukses sangatlah kecil dibandingkan dengan berbagai kegiatan yang menyebabkan degradasi lingkungan pesisir di dunia ini. Alasan lain adalah bahwa di berbagai negara berkembang, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, proyek pengelolaan wilayah pesisir dijalankan sebagai “proyek-proyek pilot/percontohan” yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Komunikasi yang terjalin diantara proyek ataupun analisis terhadap perbedaan desain tiap proyek serta dampaknya dalam pelaksanaan sangat jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah dilakukan.

Sangat sedikit jumlah proyek perencanaan pengelolaan wilayah pesisir di negara-negara berkembang, termasuk dan terutama di Indonesia, yang kemudian berhasil dilaksanakan implementasinya setelah proyeknya berakhir. Lebih sedikit lagi metodologi evaluasi yang didokumentasikan dan disebarluaskan. Kalaupun ada maka metoda evaluasi tersebut tidak menganalisis perbedaan berbagai desain dari proyek/program yang ada serta pengaruhnya terhadap hasil akhirnya. Oleh karena itu, tanpa adanya kerangka kerja evaluasi yang dapat diterima oleh para praktisi dan para pengguna lainnya maka kajian sistematis terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir akan sulit untuk dapat dilakukan dan direplikasikan.

Pertanyaan-Pertanyaan dalam Tiap Langkah

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang merefleksikan 5 langkah yang ada dalam siklus kebijakan di atas. Tiap bagian tersebut kemudian dibagi lagi kedalam topik-topik yang paling penting dalam langkah tersebut. Dalam tiap topik itulah rangkaian pertanyaan tersebut dijabarkan. Penting untuk diingat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak semuanya relevan dengan semua proyek atau program yang ada. Oleh karenanya tidak semua pertanyaan tersebut perlu dijawab atau dipergunakan. Terdapat 120 pertanyaan yang terbagi dalam 29 kategori. Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus diperlakukan hanya sebagai “petunjuk/arahan” dan bukan sebagai cetak biru yang dapat dipergunakan untuk seluruh jenis pekerjaan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun berdasarkan pengalaman yang didapat dari “pengalaman terbaik” yang terjadi diprogram-program seluruh dunia. Pengalaman terbaik tersebut berdasarkan dari studi pustaka dan pendapat-pendapat para ahli terhadap karakteristik dari pengelolaan wilayah pesisir yang efektif. Karakteristik tersebut adalah;

- Partisipasi stakeholder di setiap fase dari pengembangan proyek
- Strategis, fokus dan pengambilan keputusan dari proyek yang berdasarkan isu tertentu
- Koordinasi antar institusi baik di tingkat lokal maupun nasional
- Pengelolaan secara adaptif dan “learning”

- Analisis ilmiah yang tepat yang diperlukan oleh pengelola
- Penguatan kapasitas sumberdaya manusia dan institusional dalam pengelolaan wilayah pesisir
- Menyepadankan antara kegiatan-kegiatan proyek dengan kemampuan institusi dan SDMnya
- Kepemilikan lokal maupun nasional terhadap proyek atau program yang dilaksanakan.

Kegunaan utama pertanyaan-pertanyaan tersebut selain untuk menilai/mengkaji "diri sendiri" (*self-assessment*), tetapi dapat juga dipergunakan sebagai checklist dari disain program, kerangka kerja pelatihan, metodologi untuk mengkaji kematangan dan kapasitas proyek/program pengelolaan wilayah pesisir.

Langkah Pertama :

Identifikasi dan Pengkajian Isu

Tidak ada yang lebih penting bagi kesuksesan satu generasi pengelolaan wilayah pesisir daripada seleksi/pemilihan isu yang akan ditangani, baik permasalahannya maupun oportunitasnya. Langkah pertama ini bisa dianggap selesai apabila isu-isu dan wilayah yang akan menjadi subyek perencanaan, penelitian dan kerangka dari tindakan-tindakan pengelolaan telah terdefiniskan.

Proses identifikasi isu seringkali didasari oleh informasi yang ada ditambah dengan pelaksanaan pengkajian cepat (*rapid assessment*) untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan dan sosial di wilayah yang dipertimbangkan untuk dikelola. Namun bagaimanapun juga analisis yang lebih lama dan rinci untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, penyebabnya dan kemungkinan penanggulangannya oleh masyarakat lokal dan para pimpinan akan lebih mendukung.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan langkah pertama ini;

A. Identifikasi dan pengkajian isu wilayah pesisir

- Isu-isu pengelolaan apa saja yang menjadi sasaran/arah dari program atau proyek?
- Apa yang menjadi alasan/pemicu sehingga proyek pengelolaan sumberdaya tersebut perlu diusulkan dan bagaimana hubungannya dengan pemilihan isu yang akan ditangani oleh proyek ?
- Apakah suatu kajian telah dipersiapkan dengan baik ? Siapa yang mempersiapkan kajian tersebut

dan siapa yang membiayai kegiatan ini ?

- Siapa saja yang terlibat dalam pengkajian tersebut? Bagaimana proses keterlibatan mereka ?
- Sejauh mana pengkajian ini membahas kondisi sosial-ekonomi dari para pengguna/pemanfaat sumberdaya tersebut?
- Apakah ada analisa mengenai hubungan antara lembaga pemerintah dan lembaga lainnya dengan isu-isu pengelolaan pesisir utama pada saat ini? Apakah analisa tersebut dapat mengungkapkan kecukupan (*adequacy*) dari pengelolaan yang ada saat ini?
- Apa ruang lingkup kajian tersebut ? Teknik dan metodologi apa yang digunakan?
- Bagaimana tingkat kedalaman/ketelitian dari kajian isu ini terhadap keterbatasan ruang lingkup, sumberdaya dan waktu dalam melaksanakan program pada saat ini?

B. Kelompok *Stakeholder* Utama dan Kepentingannya

- Kelompok *stakeholder* non-pemerintah mana yang akan terpengaruh oleh adanya proyek pengelolaan sumberdaya pesisir di daerah tersebut ?
- Apakah proses pengkajian isu tersebut juga menggali pendapat/pandangan dan persepsi dari masyarakat umum yang tidak termasuk dalam suatu organisasi? Bagaimana pelaksanaannya dan apa hasilnya?
- Apakah kepentingan dari instansi pemerintah dan lembaga formal lainnya seperti universitas, kelompok pengguna, dan organisasi keagamaan telah diperhatikan? Bagaimana kepentingan-kepentingan mereka tersebut dianalisa?
- Sejauh mana kajian ini mengemukakan perbedaan atau konflik kepentingan? Apakah semua *stakeholder* dan para tokoh di tingkat lokal maupun pusat telah dilibatkan? Bagaimana hal ini dilakukan?
- Apakah kajian ini mengidentifikasi pemimpin yang berpotensi dan kelompok *stakeholder* yang keterlibatannya dalam proyek tersebut akan diprioritaskan?

C. Pemilihan Isu

- Isu apa yang telah dipilih oleh proyek sebagai fokus kegiatannya? Bagaimana dan oleh siapa isu tersebut dipilih?
- Apakah ruang lingkup dan kompleksitas isu yang

telah dipilih tersebut sesuai dengan kapasitas lembaga yang terlibat dan tim kerja proyek?

- Apakah perencanaan dan proses perumusan kebijakan untuk menjawab isu tersebut dapat menghasilkan proposal yang cukup berbobot/berkualitas agar memperoleh persetujuan formal dan pendanaan untuk implementasinya?

D. Reaksi terhadap proses pengkajian isu

- Bagaimana kualitas teknis dari kajian yang dilakukan? Apakah para pakar menilai bahwa kajian tersebut sah?
- Kepada siapa dan dalam bentuk apa hasil kajian tersebut disampaikan?
- Respon apa yang diperoleh dari pelaksanaan kajian tersebut?

E. Tujuan Program/Proyek Pengelolaan Pesisir

- Sejauh mana proyek yang diusulkan atau tujuan program mencerminkan isu-isu yang telah diidentifikasi?
- Apakah maksud/tujuan dari proyek pengelolaan sumberdaya pesisir ini telah dimengerti oleh mereka yang akan menerima dampak dari pelaksanaan nantinya?

Langkah Kedua: Persiapan Perencanaan

Pada langkah ini pengelola proyek menyusun rincian rencana aksi untuk menjawab permasalahan/ isu yang telah dipilih di langkah pertama. Tujuan spesifik, kebijakan pengelolaan dan program-program aksi dijabarkan untuk tiap isu yang dipilih. Penelitian dilaksanakan untuk mengisi data dan informasi detail yang diperlukan untuk lebih memahami permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan langkah kedua ini;

A. Pendokumentasian kondisi awal (*baseline*)

- Studi apa saja yang telah dilakukan dalam pendokumentasian kondisi awal?
- Apakah masyarakat atau kelompok *stakeholder* tertentu berpartisipasi dalam pendokumentasian tersebut?
- Apakah kondisi awal tersebut dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menganalisis perubahan di masa mendatang? Hal-hal apa saja dalam

kondisi awal tersebut yang dapat menggambarkan dampak dimasa datang akibat adanya kegiatan pengelolaan?

- Apakah lokasi/daerah kontrol (*control sites*) telah direncanakan sebagai dasar analisa dampak pengelolaan sumberdaya pesisir?

B. Penelitian Penting

- Penelitian apa saja yang telah dilaksanakan? Pertanyaan-pertanyaan (*hipotesa*) apa yang dibuat untuk dijawab oleh penelitian tersebut? Bagaimana peranan isu-isu pengelolaan tersebut dalam menentukan agenda penelitian? Apakah skala penelitian tepat untuk untuk isu yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan kebutuhan program/proyek?
- Apakah penelitian yang dilakukan berguna bagi proses perencanaan proyek?
- Siapakah pelaksana dari penelitian ini? Apakah penelitian ini melibatkan tenaga ahli lokal dan berdasarkan pada penelitian yang sudah ada? Apakah telah dipilih pakar dari luar lokasi yang keahlian dan pengalamannya dapat digunakan untuk menambah kualitas penelitian tersebut? Apakah pakar dari luar itu membimbing peneliti lokal dan bekerja untuk meningkatkan kapasitas lokal di dalam melaksanakan penelitian yang berdasarkan isu-isu pengelolaan sumberdaya pesisir?
- Apakah masyarakat dan stakeholder lainnya dilibatkan dalam penelitian? Apakah mereka mendapat informasi mengenai hasil penelitian dan implikasinya?

C. Perencanaan Pengelolaan

- Dasar pemikiran atau teori apa yang melandasi rancangan pengelolaan utama kedalam rencana pengelolaan? Bagaimana validitas dari logika atau teori tersebut?
- Untuk kelompok atau individu mana pengelolaan wilayah pesisir tersebut direncanakan?
- Perubahan-perubahan perilaku apa saja yang diharapkan dari kelompok sasaran? Seberapa pentingnya perubahan-perubahan tersebut?
- Apakah strategi pengelolaan telah mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan yang telah memiliki pengaturan dengan kegiatan yang tidak diatur? Apakah instansi pemerintah yang akan dilibatkan dalam

pelaksanaan tersebut telah diajak berkonsultasi?

- Insentif/dorongan apa yang ditawarkan atau biaya apa yang akan dibebankan kepada kelompok sasaran dalam strategi pengelolaan?
- Apakah ruang lingkup dan kompleksitas dari rencana pengelolaan tersebut sesuai dengan kapasitas lembaga-lembaga yang akan bertanggungjawab dalam pelaksanaannya?
- Apakah batasan-batasan yang diusulkan dalam perencanaan dan pengelolaan itu sesuai dengan isu-isu yang telah dipilih?

D. Struktur kelembagaan dan hukum serta proses pengambilan keputusan bagi implementasi program.

- Apakah kerangka kerja kelembagaan telah dirancang untuk melaksanakan program?
- Apakah dalam rancangan kelembagaan itu menetapkan hubungan/kaitan dalam formulasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal dan pada tingkat pemerintah pusat atau daerah (propinsi)?
- Apa saja kewenangan formal dari pengelola program? Apakah sudah cukup memadai?
- Sejauh mana strategi pengelolaan berlandaskan pada kerjasama antar lembaga yang terlibat?
- Apakah ada kesenjangan yuridiksi secara jelas? Apakah kegiatan-kegiatan pengembangan (*impact generating*) secara nyata lepas dari peraturan atau ketentuan pengelolaan lainnya?
- Apakah program ini terjadi konflik dengan program atau peraturan lainnya?
- Apakah konflik hukum (yuridiksi) telah dikenal luas? Bagaimana pemecahannya?

E. Kompetensi Staf

- Apa saja pelatihan teknis dan/atau pengelolaan dan kegiatan pengembangan kapasitas yang telah diselenggarakan bagi staf proyek dan/atau staf dari lembaga koordinatif? Apakah mereka telah mendalami pengetahuan yang relevan dengan pengalaman di berbagai tempat di negaranya, regional dan internasional? Apakah mempunyai suatu strategi peningkatan kapasitas yang khusus? Jika ada, seberapa jauh efektifitasnya?
- Pada tingkatan apa kepercayaan dan komitmen staf terhadap rencana pengelolaan? Apakah para staf mengharapkan untuk berperan secara nyata dalam pelaksanaannya?

F. Perencanaan finansial yang berkelanjutan

- Apakah telah direncanakan sumber dana keuangan dan sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program?
- Apakah telah dipersiapkan suatu strategi pendanaan bagi pelaksanaan program? Apakah pendanaan tersebut merupakan gabungan dana inti dari pemerintah dengan sumber lainnya? Sampai pada tingkat mana program ini bergantung pada penyandang dana (donatur)?

G. Kegiatan implementasi awal/pendahuluan (*Early Implementation Actions*)

- Apa jenis kegiatan pendahuluan yang dilaksanakan?
- Seberapa jauh pengalaman yang diperoleh dari kegiatan pendahuluan itu dapat ditransfer kepada isu atau lokasi lainnya?
- Apakah pengalaman yang dipetik dari kegiatan pendahuluan telah dimasukkan kedalam penyusunan kebijakan?
- Apakah kegiatan pendahuluan itu menghasilkan peningkatan yang dapat dirasakan langsung oleh para *stakeholder* ditempat kegiatan tersebut diterapkan?

H. Program pendidikan dan penyuluhan/ penyadaran bagi masyarakat

- Apakah telah dirancang program pendidikan dan penyuluhan terutama untuk menginformasikan dan melibatkan mereka yang memiliki kepentingan dalam pemilihan isu? Apakah kelompok sasaran (*target audiences*) telah diidentifikasi dan pesan-pesan penting yang disusun telah disampaikan kepada kelompok sasaran dan melalui apa pesan-pesan tersebut telah disalurkan dengan berhasil?
- Apakah kegiatan pendidikan dan upaya pelibatan yang dilakukan telah mempunyai dampak yang jelas terhadap kelompok sasaran? Apakah reaksi dan saran dari masyarakat (publik) mempengaruhi rancangan program?
- Apakah proyek telah mendidik para petugas dan tokoh/pemimpin masyarakat tentang problem wilayah pesisir dan upaya-upaya proyek untuk memudahkan pemecahan problem tersebut? Apakah para petugas senior dan para tokoh panutan tersebut berbicara secara terbuka dan penuh perhatian terhadap pengelolaan wilayah pesisir? Apakah mereka itu memahami implikasi

dari penanganan isu-isu proyek, sebab-sebabnya dan kemungkinan solusinya?

- Apakah proyek telah mengubah persepsi umum tentang isu dan kontribusinya terhadap perubahan-perubahan perilaku masyarakat?

Langkah Ketiga:

Adopsi Formal dan Pendanaan

Langkah ketiga merupakan masa dimana upaya perencanaan dikristalisasikan. Pada tahap ini sangat penting untuk memperoleh formal mandat tingkat tinggi bagi perencanaan yang disusun. Hal ini biasanya diekspresikan melalui peraturan-peraturan ataupun keputusan yang memberikan tanggungjawab dan kekuatan tertentu.

Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan langkah ketiga ini;

A. Persetujuan formal terhadap rencana pengelolaan

- Apakah proses persetujuan menjelaskan cara untuk satu periode implementasi ataukah masih diperlukan perencanaan dan/atau prosedur dan peraturan persiapan operasional lebih lanjut?
- Melalui proses apa, dan pada tingkat politik yang mana, program pengelolaan wilayah pesisir secara administratif telah disetujui?
- Isu-isu penting apa saja yang dimunculkan selama proses persetujuan?
- Lembaga/instansi pemerintah, figur politik, kelompok atau kepentingan apa saja yang banyak terlibat dalam proses persetujuan rencana tersebut?
- Dalam bentuk apa rencana strategi pengelolaan secara resmi disetujui, apakah berupa undang-undang, pemeraturan pemerintah, surat keputusan atau perjanjian antar lembaga? Apakah logika atau teori yang melandasi rancangan rencana pengelolaan pada Langkah Kedua ini secara nyata telah dimodifikasi selama proses persetujuan?

B. Penetapan kerangka kerja implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

- Apakah telah terjadi pengalihan dengan berhasil dari proyek kepada program pengelolaan suatu lembaga yang jelas didentitasnya sebagai bagian/unsur permanen di dalam struktur pemerintahan?
- Apakah telah dinegosiasikan perjanjian antar

lembaga yang bertanggungjawab khusus dalam implementasi program telah dialokasikan diantara berbagai lembaga yang ada?

- Apakah otoritas (wewenang) resmi dan kerangka kerja implementasi program cukup dipertimbangkan untuk kelancaran pelaksanaannya?
- Apakah terjadi konflik yang baru secara hukum atau dengan program lainnya yang dihadapi selama proses formalisasi program? Bagaimana terjadinya secara nyata? Apakah ada lembaga lainnya yang memprotes atau melakukan *veto* terhadap aspek-aspek program yang dilaksanakan?

C. Pendanaan implementasi program.

- Apakah sumber keuangan yang telah disepakati untuk implementasi program telah memadai? Apakah sumberdaya yang tersedia ini cukup untuk melaksanakan semua program yang ada secara maksimal?
- Berapa bagian (proporsi) biaya-biaya implementasi yang merupakan bagian dari anggaran rutin pemerintah? Berapa bagian (proporsi) dana yang didukung oleh *grant* jangka pendek dan berapa bagian dukungan proyek yang didanai oleh lembaga internasional dan lembaga lainnya?

Langkah Keempat:

Implementasi (Pelaksanaan Program)

A. Efektivitas strategi pengelolaan

- Apakah logika atau teori yang melandasi strategi pengelolaan ini cukup valid? apakah hipotesa dasar dari strategi yang telah disusun itu dapat dianalisa validitasnya?
- Bagaimana rencana strategi dapat dimodifikasi setiap waktu, jika terjadi?
- Apakah kegiatan implementasi telah dilakukan secara imbang antara aksi/tindakan yang berkaitan dengan peraturan dan yang tidak berkaitan dengan peraturan?
- Kelompok atau individu mana yang banyak terpengaruh secara langsung oleh kegiatan implementasi program? Apakah yang terkena dampak implementasi tersebut sesuai yang diharapkan dalam program yang telah dirancang dan disetujui? Jika bukan, mengapa?

B. Penegakan dan pelanggaran peraturan

- Perubahan-perubahan apa yang diinginkan dari perilaku kelompok sasaran dalam program pengelolaan? Apakah perubahan-perubahan itu telah tercapai? Jika ada, sebutkan perubahan-perubahan tersebut?
- Apakah program memberikan kontribusi berupa contoh-contoh penting bagi penegakan peraturan yang dilakukan oleh kelompok pengguna secara mandiri?
- Apakah insentif/perangsang yang ditawarkan atau biaya yang dikenakan kepada kelompok sasaran dalam strategi pengelolaan terbukti cukup efektif?

C. Kelengkapan kerangka kerja dan wewenang resmi untuk pengelolaan pesisir

- Apakah ada wewenang resmi bagi pengelola secara penuh? Perkembangan apa saja dari kerangka kerja yang telah dibuat?
- Apakah implementasi mengungkapkan kesejangan yurisdiksi secara jelas? Apakah kegiatan-kegiatan yang berdampak besar dan luas (*impact-generating*) merupakan pengecualian dari peraturan atau bentuk aturan lain bagi pengelolaan pesisir?

D. Integrasi dan kerjasama antar lembaga

- Apakah dalam implementasi ada konflik yang serius dengan program atau peraturan lainnya? Apakah kegiatan dari lembaga-lembaga tersebut konsisten dengan tujuan dan program pengelolaan pesisir?
- Apakah konflik secara hukum diangkat ke permukaan dan dikenal secara umum? Bagaimana mengatasinya? Apakah sudah dibuat aturan main antar lembaga atau telah ditetapkan mekanisme untuk mengatasi konflik yurisdiksi tersebut? Apa bentuk konfliknya? Bagaimana aturan atau mekanisme itu dapat berjalan dengan baik?
- Apakah bentuk kerjasama yang dibutuhkan antar lembaga dalam strategi pengelolaan itu akan berjalan/bekerja baik?
- Apa saja aturan organisasi yang cukup efektif untuk mengkoordinasikan atau bekerjasama antar lembaga? Aturan mana yang tidak berguna? Mengapa?
- Apakah ada lembaga lain yang melakukan veto terhadap beberapa aspek dari strategi pengelolaan?

- Insentif/perangsang apa yang diperlukan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga? Resiko/biaya apa saja yang dibebankan bagi lembaga yang tidak melakukan kerjasama?

E. Program pengadaan staf dan administrasi

- Apakah cukup personalia untuk melaksanakan strategi pengelolaan? Apakah cukup sumberdaya untuk mendukung tugas staf?
- Apakah tenaga kerja telah dikelola secara efektif?
- Apakah petunjuk administrasi dan pengerahan sumberdaya manusia cukup jelas?
- Apakah tanggungjawab setiap staf untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan dapat dipahami oleh yang bersangkutan? Apakah mereka terlibat dalam proses merancang programnya?
- Apakah staf mendukung strategi pengelolaan? Seberapa jauh komitmen dan kontribusi keahlian mereka dalam implementasinya?
- Perubahan-perubahan apa saja dalam strategi pengelolaan yang merupakan prakarsa dari staf?

F. Pengelolaan keuangan

- Apakah ada proses penganggaran dan pengelolaan keuangan?
- Bagaimana program dan pertanggungjawaban keuangannya?

G. Analisa teknis

- Penilaian teknis apa yang dibutuhkan dalam strategi pengelolaan?
- Data teknis secara khusus apa yang diperlukan sesuai tujuan pengelolaan? Apakah ada data tentang isu-isu yang valid atau realistis?
- Apakah cukup tersedia sumberdaya teknis untuk melaksanakan program? Apakah para staf mempunyai keterampilan teknis yang memadai untuk membuat penilaian secara tepat?

H. Transparansi

- Apakah kebijakan, prosedur pengambilan keputusan dan penegakan mekanisme program telah dipahami oleh sebagian besar dari mereka yang terpengaruh langsung dalam implementasinya?
- Apakah keputusan program yang tidak tepat tetap diumumkan dan diinformasikan kepada mereka yang terpengaruh terhadap program tersebut?
- Sejauh mana data yang diprogramkan (data kajian dampak, keputusan yang dihasilkan, rencana

pengembangan dan konservasi, jenis/macam pelanggaran, dan data penting lainnya) tersedia bagi *stakeholder* utama dan masyarakat umum?

I. Konstruksi (pembangunan) dan pemeliharaan infrastruktur

- Jika pembangunan infrastruktur wilayah pesisir merupakan bagian penting dari lembaga pengelolaan pesisir, apakah implementasi strategi dari unsur (pembangunan) ini telah membuat perhatian para staf melebihi unsur pengelolaan lain yang menjadi tugasnya?
- Seberapa jauh pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bagian dari kewajiban lembaga pengelola? Bagaimana penetapan secara khusus tentang kebutuhan proyek infrastruktur tersebut?
- Berapa bagian (proporsi) proyek infrastruktur ini disebut proyek besar dan proyek kecil menurut para penerima manfaat (*beneficiaries*) yang teridentifikasi?
- Seberapa jauh para penerima manfaat pembangunan infrastruktur yang teridentifikasi tersebut berpartisipasi dalam penyusunan rancangan, pendanaan, dan pengembangan proyek infrastruktur wilayah pesisir?
- Seberapa jauh penerima manfaat berpartisipasi dalam operasi dan pemeliharaan proyek infrastruktur itu?
- Apakah ada mekanisme penganggaran bagi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur? Bagaimana efektivitasnya?
- Apa standar mutu dari pembangunan infrastruktur tersebut?

J. Partisipasi

- Golongan/kelompok dan individu mana saja dari pemerintah dan non-pemerintah yang mempunyai andil paling besar dalam pengelolaan wilayah pesisir tersebut?
- Pada tingkat apa dukungan politik dari golongan tersebut terhadap pengelolaan pesisir?
- Seberapa jauh keterlibatan penerima manfaat program dan *stakeholder* utama secara aktif dalam implementasi program?
- Cara atau strategi apa yang digunakan untuk membangkitkan partisipasi mereka? Seberapa jauh tingkat keberhasilannya?

K. Resolusi konflik

- Jika ada, konflik apa yang muncul dalam implementasi program?
- Apa saja teknik resolusi konflik yang digunakan? Bagaimana keberhasilannya?

L. Dukungan politik

- Apakah ada figur politik senior dalam program/proyek? Apakah mereka mendukung program?
- Apakah mereka dipilih atau ada petugas pemerintah lain yang ditunjuk menempati posisi dalam program? Bagaimana dukungan mereka terhadap program? Bagaimana, jika terjadi, perubahan dukungan mereka sepanjang waktu program?
- Dalam implementasinya, problem utama apa yang dihadapi menurut pendapat para petugas yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan? Bagaimana menurut petugas lembaga lainnya? Bagaimana menurut petugas non-pemerintah (LSM)?
- Bagaimana dukungan dari kelompok non-pemerintah (LSM)?
- Apakah program/proyek ini mendapat dukungan secara umum dari masyarakat? Dalam bentuk apa atau bagaimana dukungan tersebut diwujudkan atau diekspresikan?

M. Program monitoring (pemantauan)

- Apakah telah dirumuskan mengenai program monitoring? Apakah program monitoring itu menekankan pada data administrasi, data lingkungan, data sosial atau data kombinasi?
- Sumberdaya apa dan kapan staf dibutuhkan dalam program monitoring? Apakah penempatan staf telah sesuai permintaan yang rasional?
- Apakah ada rancangan analitis untuk menyusun berbagai kesimpulan yang diolah dan dipertimbangkan dari data yang telah dikumpulkan? Apakah lokasi kontrol telah dimasukkan ke dalam rancangan analitis?
- Indikator apa yang digunakan untuk menilai program utama? Bagaimana validitasnya?
- Untuk ekologi pesisir, berapa kali data dikumpulkan? Pada skala ruang apa data dikumpulkan?
- Data monitoring apa yang dikumpulkan? Seberapa jauh program/proyek mengatur tentang rencana monitoring?

- Keputusan administrasi rutin, rencana atau kegiatan apa yang diinformasikan dalam program monitoring?
- Bagaimana data monitoring dikumpulkan, disimpan dan diolah untuk diinformasikan? Siapa yang mengakses data tersebut?

Langkah Kelima: Evaluasi

A. Kegunaan dan dampak dari evaluasi

- Apakah evaluasi dinyatakan secara jelas dalam dokumen proyek?
- Apakah swa-kaji (*self-assessment*) atau bentuk evaluasi lainnya telah dilaksanakan dalam program? Apakah dilaksanakan untuk beberapa proyek atau beberapa komponen lain dari program?
- Tipe evaluasi yang mana telah dilaksanakan?
- Bagaimana hasil evaluasi dikomunikasikan?
- Bagaimana hasil evaluasi digunakan?
- Bagaimana, jika ada, evaluasi memberikan kontribusi kepada *learning* secara organisatoris?

STUDI KASUS :

PENERAPAN SIKLUS KEBIJAKAN/ PROYEK

A. PEMILIHAN ISU

- Di Srilangka, rencana pengelolaan wilayah pesisir *generasi pertama* (satu siklus) dimulai pada tahun 1983, proses identifikasi isu dilaksanakan oleh staf Departemen Konservasi Pesisir (Coast Conservation Department = CCD).
- Isu-isu penting yang dipilih dari hasil identifikasi adalah erosi pantai, degradasi dan deplesi habitat dan hilangnya sumberdaya sejarah, budaya dan keindahan alam pada daerah pesisir.
- Erosi pantai dipilih secara nyata karena bagian dari tugas departemen. Pengelolaan habitat dan perlindungan tempat bersejarah dan berbudaya dilakukan melalui proses penetapan peraturan pada lebar 300 m di pesisir yang termasuk dalam area konservasi pantai.
- Perhatian lainnya pada limbah industri terhadap habitat estuaria. Program pengelolaan kualitas air di wilayah pesisir dilakukan pada perencanaan *generasi kedua* (siklus kedua) pada tahun 1997.

Oleh karena itu, satu generasi (satu siklus kebijakan) proyek/program pengelolaan wilayah pesisir di Srilangka dalam kasus ini selama 14 tahun.

B. UNSUR-UNSUR PENTING UNTUK MENGGAMBARAKAN PROFIL (*PROFILING*) SUATU WILAYAH PESISIR

a. Bagaimana kondisi ekosistem pada saat ini ?

- Menggambarkan karakteristik habitat, spesies dan komunitas biologis.
- Mengidentifikasi perkembangan kondisi dan pemanfaatan sumberdaya, serta menggambarkan pertimbangan implikasi jangka pendek dan jangka panjang terhadap perubahan-perubahan lingkungan dan atau sosial.
- Mengidentifikasi masalah-masalah sumberdaya dan peluang pengelolaan yang dinilai penting pada lokasi-lokasi yang spesifik.

b. Bagaimana kualitas hidup masyarakat pada area tersebut?

- Mengkaji indikator yang dapat dikuantifikasi (*material indicators*) seperti pendapatan, gizi, perumahan, pendidikan, dan sebagainya, juga indikator yang tidak tampak/sulit dikuantifikasi (*intangible indicators*) misalnya harapan, impian, dan ketakutan masa depan dari masyarakat.
- Apa yang ada dalam pikiran masyarakat? Isu-isu apa yang dapat diatasi sendiri oleh masyarakat lokal?

b. Bagaimana konteks kelembagaan bagi sumberdaya pada area yang telah ditentukan?

- Apa peranan dan tanggungjawab lembaga pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir? Apakah ada lembaga yang dipersiapkan untuk menangani isu pengelolaan sumberdaya yang penting? Bagaimana peranan pengelola yang berubah-ubah dari waktu ke waktu? Apakah ada pengelolaan secara tradisional yang relevan untuk masalah-masalah yang kontemporer?
- Mengkaji kemampuan lembaga-lembaga dalam mengelola isu-isu pada saat ini dan masa mendatang berdasarkan kemampuan teknis dan kredibilitas publiknya?

C. BASELINE STUDIES (STUDI KONDISI AWAL)

- Studi *baseline* tentang sosial-ekonomi dan lingkungan pada tingkat desa telah dilaksanakan di desa Bentenan dan Tumbak (Minahasa, Sulawesi Utara) oleh Proyek Pesisir.
- Studi sosial-ekonomi ini mengumpulkan informasi demografi berbasis rumah tangga, jenis kegiatan produktif rumah tangga, praktek perikanan, dan sikap-sikap penduduk terhadap aktifitas pemanfaatan sumberdaya pesisir di kedua desa tersebut.
- Survey lingkungan pada kedua desa tersebut dibagi dalam 12 stasiun transek untuk sensus jenis-jenis ikan dan kondisi terumbu karang.

D. CIRI-CIRI KEBERHASILAN KEGIATAN PENDAHULUAN (Early Action)

- Kegiatan berjangka pendek kurang dari 12 bulan.
- Hasil kegiatan secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- Melibatkan berbagai kelompok, dalam arti kegiatan ini memerlukan koordinasi sebanyak mungkin kelompok yang beragam.
- Kegiatan ini mempertimbangkan perilaku sosial dalam penggunaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir.
- Menghasilkan publisitas positif bagi proyek pengelolaan pesisir.

PENUTUP

Pengalaman global maupun regional menunjukkan bahwa program pengelolaan wilayah pesisir menjadi "dewasa" setelah menyelesaikan secara berturut-turut beberapa "siklus". Satu siklus dapat membutuhkan waktu 8-15 tahun dan dapat dianggap sebagai satu generasi dari program pengelolaan. Siklus awal biasanya dimulai dengan menjawab beberapa isu yang sangat mendesak untuk segera diatasi dalam lingkup geografi terbatas. Setelah melalui "belajar dari pengalaman" barulah kita mencoba menjawab isu-isu yang lebih rumit dan lingkup wilayah yang lebih luas.

Dalam mempelajari pengalaman pelaksanaan pengelolaan pesisir, yang penting untuk diperhatikan adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan akhir dari program tersebut, yaitu; (1) kualitas hidup komunitas pesisir yang berkelanjutan dan (2) kualitas lingkungan hidup wilayah pesisir yang lestari. Urut-urutan untuk dapat mencapai tujuan akhir tersebut dapat digambarkan sebagai pencapaian tujuan antara pada generasi pertama, kedua dan ketiga. Skala waktu yang demikian panjang berada diluar "masa kerja" proyek atau program yang dibiayai oleh bank-bank pembangunan maupun donor-donor internasional. Oleh karena itu untuk dapat selalu menarik benang merah dari satu siklus/generasi ke siklus/generasi berikutnya ataupun mengikuti setiap langkah dalam satu siklus diperlukan adanya metoda evaluasi yang sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- GESAMP (IMO/FAO/UNESCO-IOC/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). 1996. The contributions of science to coastal zone management. Rep.Stud.GESAMP, (61):66p.
- Kay, R. and J. Alder. 1999. Coastal Planning and Management. E & FN SPON. London and New York.
- Margolius, R., and N. Salafsky. 1998. Measures of success: designing, managing and monitoring conservation and development projects. Island Press, Washington, D.C.
- Owens, J.M. 1993. Program Evaluations: Forms and Approaches. Allen & Unwin, Melbourne.
- Olsen, Stephen., Kem Lowry., Jim Tobey. 1998. Coastal Management Planning and Implementation: A Manual for Self-Assessment. The University of Rhode Island, Coastal Resources Center. Graduate School of Oceanography. Narragansett, Rhode Island.
- Sabatier, P. and D. Mazmanian. 1981. The implementation of Public Policy: A Framework for Analysis. In *Effective Policy Implementation*, ed. by D. Mazmanian and P. Sabatier, Lexington, Mass. Lexington Books.
- USAID. 1987. AID Program Design and Evaluation Methodology Report No. 7. AID Evaluation Handbook. Agency for International Development, Washington, D.C. USA.